



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a BAB I PENDAHULUAN
- b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM. . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 Juli 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD



LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 281 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN
2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET TAHUN 2025

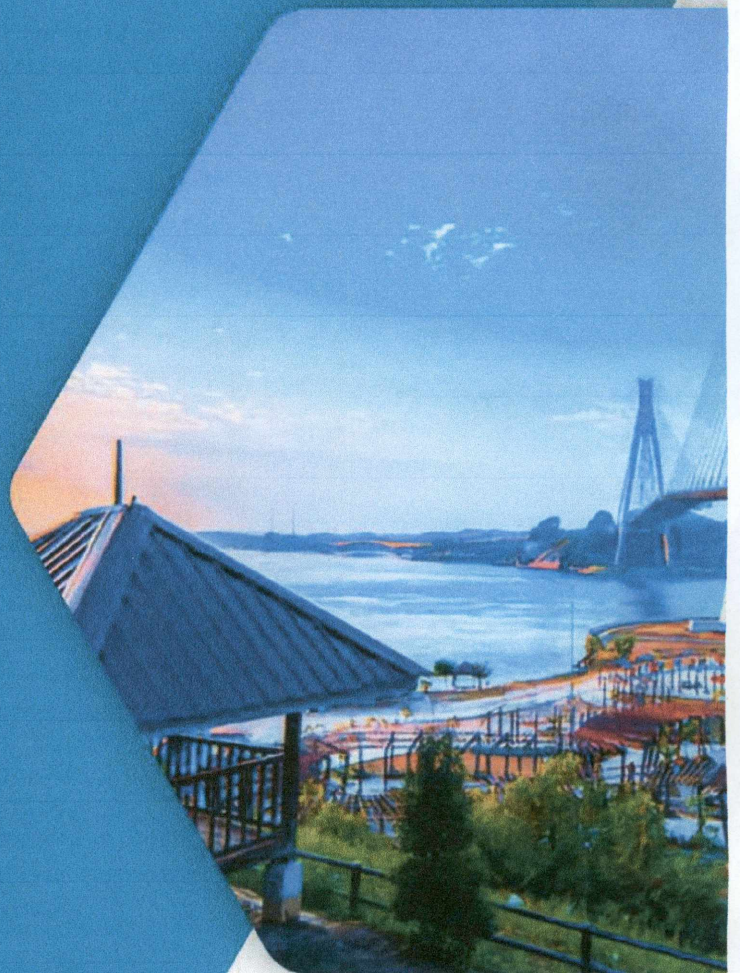
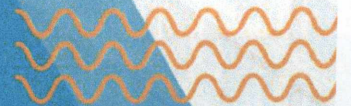




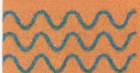
Pemerintah Daerah
Kota Batam

PERUBAHAN RENCANA KERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025



2025



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 disesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, Perlu dipertimbangkan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah dikarenakan adanya perkembangan lingkungan strategis yang berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan Program Kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Dokumen Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, 30 Juni 2025

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kota Batam

Abd. Malik, S.E., M.Si

NIP.19660727 199603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL.....iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum..... 3

 1.3 Maksud dan Tujuan 4

 1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN) 6

 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025.....6

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah16

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....16

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....18

BAB IV PENUTUP.....35

 4.1 CatatanPenting.....35

 4.2 KaidahPelaksanaan.....35

 4.3 Rencana TindakLanjut.....36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.....10

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam sampai denga triwulan II/Juni Tahun 2025..... 16

Tabel 3.1. Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.....21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja

Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 7 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025 maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam sebagai berikut

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
4. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam

Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 7 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025 maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam sebagai berikut

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Perturan Presiden Republik Indonesi Nomor 72 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
4. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau : (7,44/2021))

9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau : 6,39/2023);
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 203 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Sistem Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam
12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025 yaitu:

- a. Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- b. Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut:

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.3.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.3.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.3.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.4.1 Pengadaan Mebel
 - 1.4.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.4.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**
 - 2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - 2.1.1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - 2.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 2.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - 2.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - 2.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - 2.1.6 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

- 2.2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 2.2.1 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
 - 2.2.2 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - 2.3.1 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - 2.3.2 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - 2.3.3 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- 2.4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 2.4.1 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- 2.5 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
 - 2.5.1 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 3.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 3.1.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - 3.1.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - 3.1.3 Inventarisasi Barang Milik Daerah
 - 3.1.4 Pengamanan Barang Milik Daerah
 - 3.1.5 Penilaian Barang Milik Daerah
 - 3.1.6 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 3.1.7 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 3.1.8 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Program/kegiatan diatas tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan dikarenakan output dari sub kegiatan tersebut merupakan laporan yang akan dilaporkan di akhir tahun 2025, sedangkan untuk pengukuran Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dilakukan sampai dengan Triwulan II (s.d Juni 2025).

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan II

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4	5	6 = 5/4*100
						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5	02					KEUANGAN				
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	30%	30%
5	02	01	02	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	50%	50%
5	02	01	02	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Bulan	85 Orang/bulan	94,44%
5	02	01	02	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	6 Dokumen	50%
5	02	01	02	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	5%	5%
5	02	01	02	05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	2 Orang	5%
5	02	01	02	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	79,17%	79,17%

5	02	01	02	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	25%
5	02	01	02	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	60%
5	02	01	02	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
5	02	01	02	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	4 Paket	66,67%
5	02	01	02	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5	02	01	02	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6 Laporan	50%
5	02	01	02	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	0%	0%
5	02	01	02	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit	0 Unit	0%
5	02	01	02	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	77 Unit	0 Unit	0%
5	02	01	02	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0%
5	02	01	02	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	16,67%	16,67%
5	02	01	02	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0 Laporan	0%
5	02	01	02	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	0 Laporan	0 Laporan	0%
5	02	01	02	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%
5	02	01	02	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100 %	25%	25%

5	02	01	02	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	4 unit	100%
5	02	01	02	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	3 unit	75%
5	02	01	02	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	204 Unit	102 Unit	50%
5	02	02				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
5	02	02	02	01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu	100%	50%	50%
5	02	02	02	01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
5	02	02	02	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
5	02	02	02	01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
5	02	02	02	01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	0 Dokumen	0%

5	02	02	02	01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
5	02	02	02	01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	800 Orang	0 Orang	0%
5	02	02	02	02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	0%	0%
5	02	02	02	02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
5	02	02	02	02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	500 Orang	0 Orang	0%
5	02	02	02	03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun	100 %	25%	25%
5	02	02	02	03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	1 Laporan	33,33%
5	02	02	02	03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan	100%
5	02	02	02	03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6 Dokumen	0 Dokumen	0%

5	02	02	02	03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	47 Orang	0 Orang	0%
5	02	02	02	04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dana Tidak Terduga yang Tersedia	100%	0%	0%
						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	0 Laporan	0%
5	02	02	02	05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Presentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah	100 %	0%	0%
5	02	02	02	05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
5	02	03				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	100%	50%	50%
5	02	03	02	01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi	100%	50%	50%
5	02	03	02	01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
5	02	03	02	01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
5	02	03	02	01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	0 Laporan	0%
5	02	03	02	01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	0 Laporan	0%

5	02	03	02	01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	0 Laporan	0%
5	02	03	02	01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	0 Laporan	0%
5	02	03	02	01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	0 Laporan	0%
5	02	03	02	01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
5	02	03	02	01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	0 Laporan	0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025 s/d Triwulan II

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra tahun 2025 TW II		Catatan Analisis
1	2	3		4		5
1	Opini BPK	WTP	100%	WTP	100%	
2	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100%	100%	50%	50%	
3	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan APBD	Tepat waktu	100%	Tepat Waktu	100%	
4	Persentase laporan OPD yang lengkap sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase penurunan masalah penilaian dan pengakuan aset	100%	100%	50%	50%	

2.3 Isu-Isu Penting/ Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu Penting/Strategis Pelayanan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Regulasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset sangat dinamis sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya;
2. Kompetensi dan kualitas SDM terbatas;

3. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
4. Penyusunan RKA-SKPD dan DPA SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen Perencanaan Daerah;
5. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

Program, Kegiatan serta Sub kegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.1.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.3.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.4.1 Pengadaan Mebel
 - 1.4.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

2.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

2.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

2.2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

2.2.1 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

2.3.1 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

2.3.2 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

2.3.3 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

3.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah

3.1.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah

Program dan kegiatan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam pada Tahun 2025 meliputi 3 Program, 12 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 87.183.358.958,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), sedangkan pada Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam pada Tahun 2025 meliputi 3 Program, 12 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 48.675.974.811,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah).

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025 memuat pergeseran atau penambahan atau pengurangan output sub kegiatan dan penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut mencakup semua rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang dianggarkan dan di entri pada Aplikasi SIPD-RI, sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Kode	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	29.138.996.756,00	28.033.706.184,00	(1.105.290.572,00)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	23.423.006.736,00	21.459.931.477,00	(1.963.075.259,00)	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Bulan	87 Orang/Bulan	23.423.006.736,00	23.832.634.901,00	409.628.165,00	

	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	159.960.000,00	159.960.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	565.607.500,00	78.465.000,00	(487.142.500,00)	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	5 Orang	565.607.500,00	78.465.000,00	(487.142.500,00)	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	2.574.984.000,00	2.208.394.150,00	(366.589.850,00)	
	Penyediaan Komponen Instalasi	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen	Jumlah Paket Komponen Instalasi	4 Paket	1 Paket	50.730.000,00	38.081.000,00	(12.649.000,00)	

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7 Paket	788.519.000,00	845.682.000,00	57.163.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	6 Paket	130.448.000,00	90.554.000,00	(39.894.000,00)	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	694.733.000,00	661.503.000,00	(33.230.000,00)	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3 Dokumen	16.200.000,00	14.400.000,00	(1.800.000,00)	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	894.354.000,00	558.174.150,00	(336.179.850,00)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	1.757.375.000,0 0	1.042.312.000,0 0	(715.063.000,00)	
	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit	5 Unit	152.715.000,00	32.605.000,00	(120.110.000,00)	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	77 Unit	26 Unit	679.230.000,00	363.312.000,00	(315.918.000,00)	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	925.430.000,00	646.395.000,00	(279.035.000,00)	

			Lainnya yang Disediakan							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%	311.283.520,00	298.500.133,00	(12.783.387,00)	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	8.784.000,00	2.504.853,00	(6.279.147,00)	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	0 Laporan	2 Laporan	0,00	18.072.000,00	18.072.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	302.499.520,00	277.923.280,00	(24.576.240,00)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	506.740.000,00	413.440.000,00	(93.300.000,00)	

			Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Daerah yang layak fungsi						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	4 unit	161.010.000,00	146.230.000,00	(14.780.000,00)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	3 unit	182.240.000,00	109.430.000,00	(72.810.000,00)	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	204 Unit	203 Unit	163.490.000,00	157.780.000,00	(5.710.000,00)	

	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Tepat Waktu	Tepat Waktu	55.165.290.903, 00	15.122.039.627, 00	(25.786.796.654,0 6)	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu	100%	100%	2.084.690.000,0 0	1.717.813.000,0 0	(366.877.000,00)	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	139.900.000,00	164.000.000,00	24.100.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	123.400.000,00	115.500.000,00	(7.900.000,00)	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	3 Dokumen	651.423.000,00	637.573.000,00	(13.850.000,00)	

	Daerah tentang Penjabaran APBD	Daerah tentang Penjabaran APBD								
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	3 Dokumen	625.893.000,00	616.489.000,00	(9.404.000,00)	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	201.644.000,00	84.611.000,00	(117.033.000,00)	
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	800 Orang	800 Orang	342.430.000,00	99.640.000,00	(-242.790.000,00)	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase Koordinasi dan Pengelolaan	Presentase Koordinasi dan Pengelolaan	100 %	100 %	708.911.026,00	4.260.000,00	(704.651.026,00)	

			Perbendaharaan Daerah	Perbendaharaan Daerah						
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	1 Dokumen	25.991.660,00	4.260.000,00	(21.731.660,00)	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	500 Orang	0 Orang	682.919.366,00	0,00	(682.919.366,00)	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun	Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun	100 %	100 %	517.996.000,00	721.500.000,00	203.504.000,00	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,	Jumlah Laporan Pertanggungjawabab n Pelaksanaan APBD Bulanan,	3 Laporan	11 Laporan	53.100.000,00	53.100.000,00	0,00	

	Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Triwulanan dan Semesteran	Triwulanan dan Semesteran						
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan	59.980.000,00	39.980.000,00	(20.000.000,00)	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6 Dokumen	7 Dokumen	293.396.000,00	224.860.000,00	(68.536.000,00)	

	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	47 Orang	20 Orang	111.520.000,00	403.560.000,00	292.040.000,00	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dana Tidak Terduga yang Tersedia	Persentase Dana Tidak Terduga yang Tersedia	100%	100%	51.054.950.377,00	12.345.130.627,00	(38.709.819.750,00)	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	51.054.950.377,00	12.345.130.627,00	(38.709.819.750,00)	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah	100 %	100 %	798.743.500,00	333.336.000,00	(465.407.500,00)	
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Dokumen	1 Dokumen	798.743.500,00	333.336.000,00	(465.407.500,00)	

		Bidang Keuangan Daerah								
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	100%	100%	2.879.071.299,00	5.520.229.000,00	2.641.157.701,00	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi	Persentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi	100%	100%	2.879.071.299,00	5.520.229.000,00	2.641.157.701,00	
	Penyusunan Standar Harga	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen	2 Dokumen	329.800.000,00	329.752.000,00	(48.000,00)	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	99.686.000,00	98.609.000,00	(1.077.000,00)	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	3 Laporan	600.623.568,00	379.378.000,00	(221.245.568,00)	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	51.358.931,00	28.670.000,00	(22.688.931,00)	

			Barang Milik Daerah							
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	666.829.000,00	2.543.746.000,00	1.876.917.000,00	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	462.078.000,00	1.293.798.000,00	831.720.000,00	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	456.360.000,00	520.260.000,00	63.900.000,00	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	176.642.000,00	305.684.000,00	129.042.000,00	

	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	35.693.800,00	20.332.000,00	(15.361.800,00)	
	JUMLAH						87.183.358.958, 00	48.675.974.811, 00	(38.507.384.147,0 0)	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025 - 2029 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta Target dan Sasaran Pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain:

1. Penggunaan anggaran APBD Kota Batam se-efektif mungkin dan tepat sasaran;
2. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam yang telah diusulkan dan ditetapkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD